

Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2023)

Alifia Aprilianti Cahya^{1*}, Ridwan²

Universitas Indonesia Membangun

Penulis Korespondensi : alifiaapriliantichya@student.inaba.ac.id^{1*}
ridwan@inaba.ac.id²

Article Information:

Received: July 22, 2025, Accepted: July 28, 2025, Published: 29 Juli 2025

Abstract

The research aims to investigate the impact of regional compensation, equalization funds, and capital investment on local financial autonomy across 13 regencies in West Java Province from 2019 to 2023. Regional financial independence is a vital metric used to assess a region's capacity to finance its governance without relying heavily on central government assistance. The study adopts a quantitative method with both descriptive and verification approaches. Purposive sampling technique was used, selecting 13 out of 27 available regencies and cities. Classical assumption tests, including a normality assessment using the Kolmogorov–Smirnov technique, yielded a significant result (Sig.=.055). The outcome of the simultaneous significance test (F-test) indicates that, simultaneously, regional retribution, balancing funds, and capital expenditure significantly affect regional financial independence (Sig.=.011). However, the t-test findings show that only balancing funds and capital expenditure have a significant individual effect, while regional retribution does not. The adjusted coefficient of determination (Adjusted $R^2 = .047$) suggests that the selected independent factors in the regression model account for only 4.7% of the variation in regional financial independence, with the remaining variation explained by other external factors. These findings suggest that local governments should prioritize the effective management of equalization funds and capital expenditures to promote sustainable regional financial independence.

Keywords: Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Jawa Barat

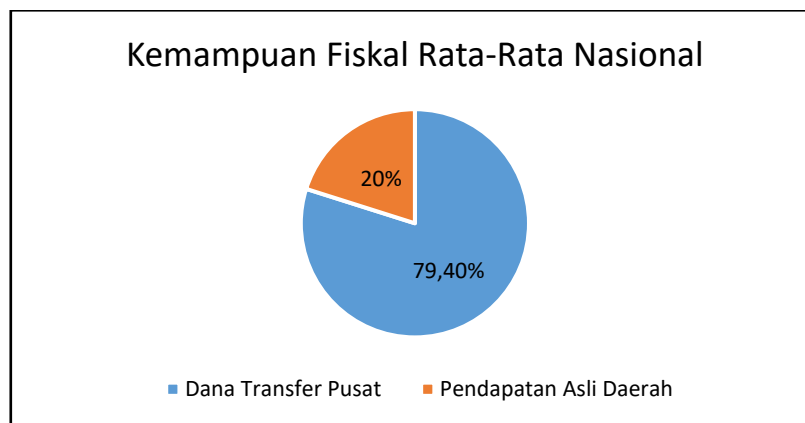
1. Pendahuluan

Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah dalam melakukan pemerintahannya, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah

Published by:

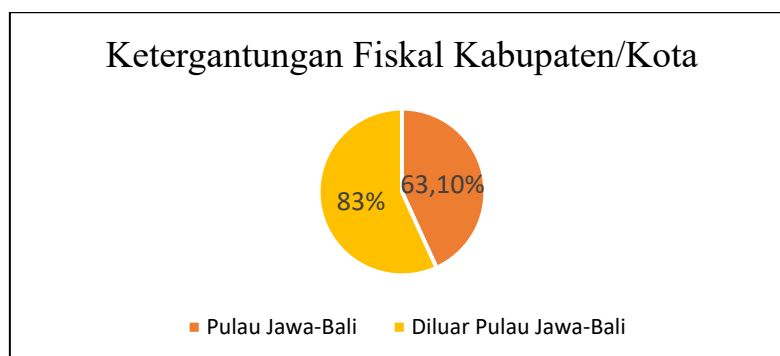
daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat”.

Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak merata, terutama di luar Jawa-Bali. Tingginya ketergantungannya pemerintah daerah pada biaya yang ditransfer oleh pemerintah pusat pada akhirnya berkontribusi terhadap lemahnya kinerja keuangan daerah. Optimalnya Kinerja keuangan daerah mempengaruhi kualitas pengeluarannya, karena dana disalurkan sesuai sesuai prioritas pembangunan dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Secara mendasar, kualitas belanja dapat dinilai dari beberapa elemen, seperti ketepatan waktu yang meliputi penetapan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) yang tepat, realisasi belanja yang tepat, dan realisasi pendapatan yang tepat.[Hasibuan \(2021\)](#)



Gambar 1. Diagram Ketergantungan Fiskal
Sumber : Litbang Kompas, 2025

Rasio ketergantungan fiskal pada Gambar 1. dihasilkan dari analisis APBD tahun 2023 yang melibatkan 508 kabupaten/kota di Indonesia. Dari 508 daerah, hanya 22 daerah atau 4,3% yang ketergantungannya pada transfer dari pusat termasuk rendah, yaitu kurang dari 50%.



Gambar 2. Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota
Sumber : Litbang Kompas, 2024

Hasil analisis menunjukkan kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali ketergantungan fiskalnya lebih rendah dibandingkan luar Jawa-Bali. Kondisi ini sekaligus menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan yang berdampak pada kesenjangan kegiatan ekonomi yang membuat daerah tidak bisa menggali sumber. Kemandirian daerah dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menunjukkan seberapa berhasil daerah tersebut melaksanakan otonomi. ([Arrasyidah & Syarif, 2024](#))

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang besar yang seharusnya pemerintah daerah harus mengelolanya dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut informasi dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) Kemenkeu, Jawa Barat memiliki rasio pendapatan asli daerah tertinggi di antara tujuh provinsi di Indonesia, yaitu 79,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya PAD belum menjamin tingkat kemandirian keuangan yang optimal.

Tabel 1. Data Perhitungan Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023

Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Kab Ciamis	10,19%	Instruktif
Kab Cianjur	17,55%	Instruktif
Kab Cirebon	22,14%	Instruktif
Kab Garut	11,97%	Instruktif
Kab Indramayu	21,99%	Instruktif
Kab Kuningan	11,76%	Instruktif
Kab Majalengka	20,71%	Instruktif
Kab Subang	22,23%	Instruktif
Kab Sukabumi	20,18%	Instruktif
Kab Sumedang	21,35%	Instruktif
Kab Tasikmalaya	9,68%	Instruktif
Kota Banjar	19,78%	Instruktif
Kab Pangandaran	21,90%	Instruktif

Sumber: DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan), 2025

Berdasarkan fenomena dan hasil perhitungan rasio kemandirian pada tabel 1. bahwa tingkat rasio kemandirian pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 masih didominasi oleh daerah yang memiliki pola hubungan Instruktif. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan fiskal lokal akibat PAD yang minim dan dominannya dana transfer. Terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memiliki pola hubungan Instruktif di Provinsi Jawa Barat dengan Nilai terkecil dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya sebesar 9,68%. Faktor ini disebabkan oleh kecilnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah di 13 wilayah tersebut, sedangkan dana transfer semakin besar. Tingkat kemandirian keuangan daerah mempengaruhi konektivitas antara institusi daerah dan institusi pusat, dimana sebagian besar kewilayahan masih berada dalam pola hubungan Instruktif yang menggambarkan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Aspek pengelolaan keuangan ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kebijakan fiskal yang lebih adil dan efisien. ([Fitriani & Syarif, 2025](#))

Dari hasil Penelitian sebelumnya penelitian ini menyoroti tiga faktor utama yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa Retribusi Daerah Kota Banjar mengalami kenaikan

Published by:

sebesar Rp.2.040 Milyar, namun tidak disertai dengan peningkatan persentase Kemandirian Keuangannya. Rasio Kemandirian keuangan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 1,91%. Kondisi tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan [Putra \(2018:185\)](#) bahwa redistribusi daerah adalah kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada masyarakat sebagai kompensasi pemerintah daerah dari layanan atau izin tertentu yang disediakan. Temuan penelitian oleh [Saraswati & Nurharjanti \(2021\)](#) mendukung pandangan ini dengan ditemukan menyatakan retribusi daerah memberikan pengaruh yang nyata dan positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan suatu daerah.

Tabel 2. Data Realisasi Anggaran Pola Hubung Instruktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Tahun	(Dalam Milyar Rupiah)			Rasio Kemandirian
		Retribusi daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	
Kota Banjar	2022	4,14	546,44	92,01	21,69%
	2023	6,18	543,71	76,70	19,78%
Kab Tasikmalaya	2022	5,56	2.176,62	306,85	10,79%
	2023	5,39	2.308,10	334,99	9,68%
Kab Sukabumi	2022	12,36	2.586,16	452,41	21,32%
	2023	14,53	2.789,74	477,02	20,18%

Sumber : DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan), 2025

Kemudian Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya meningkat sebesar 131,48 juta rupiah, tetapi rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Tasikmalaya turun sebesar 1,11%. Temuan ini bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 yang berbunyi “Dana Perimbangan tidak hanya alat bantu pembiayaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai instrumen guna menekan disparitas dalam sumber pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menekan ketimpangan fiskal yang terjadi antar pemerintah daerah.” Hal tersebut didukung oleh hasil riset ([Darise, 2024](#)) yang menunjukkan jika dana perimbangan mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan nyata pada kemandirian keuangan daerah.

Berikutnya, Belanja Modal di Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 24,61 juta rupiah, namun tingkat rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Sukabumi justru menurun sebesar 1,14%. Hal itu tidak selaras dengan teori yang dikemukakan oleh [Hidayat \(2021:82\)](#) bahwa “belanja modal adalah biaya yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap atau barang dengan masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran, yang juga digunakan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.” Studi yang diungkapkan ([Berliani, 2016](#)) menunjukkan semakin tinggi Belanja Modalnya, jadi pendapatan daerahnya pun bertambah dan tidak lagi mengandalkan keuangan dari pemerintah sehingga tingkat kemandirian keuangan meningkat. Belanja modal berperan sebagai pelaksanaan program pemerintahan daerah dalam menambah aset tetap untuk pelayanan publik sehingga pada saat belanja modal bernilai tinggi maka pelayanan publik untuk kemandirian daerah tersebut akan baik. Hal tersebut diperkuat oleh temuan [Riyadi \(2022\)](#), jika Belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Kajian Pustaka

Menurut [Hidayat \(2021:6\)](#) Akuntansi pemerintah dapat diartikan sebagai suatu layanan yang

Published by:

menyajikan data keuangan sektor publik dengan fokus pada kegiatan pencatatan, pengelompokan, ringkasan serta catatan aktivitas keuangan pemerintah dan pemahaman terhadap data yang tercermin pada catatan keuangan.

Menurut [Mahmudi \(2019:4\)](#) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah "salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pemberian hak-hak public, yang mencakup hak kepada masyarakat untuk mengetahui, hak untuk menerima informasi, dan hak untuk menyatakan pendapat".

Menurut [Fitra \(2019:13\)](#), Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen yang memuat ringkasan mengenai asal-usul, distribusi, serta penggunaan dana publik yang diurus oleh pemerintah, dengan tujuan menampilkan komparasi antara rencana anggaran dan realisasi aktual didalam satu periode pelaporan. Komponen utama yang yang disajikan mencakup pendapatan LRA, belanja, transfer, serta unsur pembiayaan.

Menurut [Siregar \(2017:31\)](#) Pendapatan Asli Daerah adalah: "Dana daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal yang pengambilannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah. Elemen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta jenis penerimaan sah daerah lainnya."

[Halim \(2016:230\)](#) menjelaskan jika Kemandirian Keuangan Daerah yaitu "Kapasitas suatu entitas daerah untuk mendanai aktivitas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan layanan publik secara mandiri, tanpa ketergantungan pada sumber dana dari pihak luar, termasuk transfer fiskal dari pemerintah pusat."

Berdasarkan [Putra \(2018:185\)](#) retribusi daerah merupakan pengeluaran biaya yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan mendapatkan imbalan langsung.

[Djaenuri \(2019:100\)](#) memaparkan dana perimbangan adalah: "Dana yang dikumpulkan oleh pemerintah yang berasal dari APBN guna mendukung pelaksanaan kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan sasaran utama peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata."

Menurut [Halim \(2016:214\)](#) menjelaskan bahwa belanja modal adalah: "Pengeluaran pemerintah yang hasilnya untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah pengeluaran rutin."

3. Metodologi Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam pengaruh retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019–2023, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs web resmi (<https://www.djpk/kemenkeu.co.id>), (<https://bps.go.id>), dan beberapa jurnal ilmiah lainnya.

Seluruh 27 entitas pemerintah daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat menjadi populasi penelitian ini.

Tabel 3. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat				
1	Kabupaten Bandung	10	Kabupaten Karawang	19	Kota Bandung

Published by:

2	Kabupaten Bandung Barat	11	Kabupaten Kuningan	20	Kota Banjar
3	Kabupaten Bekasi	12	Kabupaten Majalengka	21	Kota Bekasi
4	Kabupaten Bogor	13	Kabupaten Pangandaran	22	Kota Bogor
5	Kabupaten Ciamis	14	Kabupaten Purwakarta	23	Kota Cimahi
6	Kabupaten Cianjur	15	Kabupaten Subang	24	Kota Cirebon
7	Kabupaten Cirebon	16	Kabupaten Sukabumi	25	Kota Depok
8	Kabupaten Garut	17	Kabupaten Sumedang	26	Kota Sukabumi
9	Kabupaten Indramayu	18	Kabupaten Tasikmalaya	27	Kota Tasikmalaya

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Riset ini menggunakan pendekatan *non-probability sampling* dalam proses pemilihan sampel. Salah satu teknik yang dipakai adalah *purposive sampling*, yang merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. ([Sugiyono, 2022:85](#)).

Berikut ini kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
2. Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang memiliki Rasio Kemandirian Daerah dibawah 25% (Instruktif).

Tabel 4. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	27
2	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang tidak memiliki rasio dibawah 25% (Instruktif)	(14)
3	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang menjadi sampel sesuai dengan kriteria	13
4	Data 13 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat x 5 tahun	65

Sesuai kriteria di atas, dari populasi yang terdiri dari 27, terdapat 13 daerah yang terpilih sebagai sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Objek Penelitian

No	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian	No	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian
1	Kab Ciamis	10,93%	8	Kab Subang	22,42%
2	Kab Cianjur	18,44%	9	Kab Sukabumi	21,10%
3	Kab Cirebon	22,75%	10	Kab Sumedang	22,30%
4	Kab Garut	12,69%	11	Kab Tasikmalaya	10,52%
5	Kab Indramayu	21,89%	12	Kota Banjar	20,96%
6	Kab Kuningan	12,31%	13	Kab Pangandaran	22,24%
7	Kab Majalengka	21,23%			

Sumber: Data diolah 2025

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengujian Deskriptif

Tabel 6. Hasil Pengujian Descriptive

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Retribusi Daerah	65	0.19%	8.13%	1.0419%	1.18147%
Dana Perimbangan	65	52.74%	90.50%	74.2796%	6.11445%
Belanja Modal	65	7.57%	34.15%	14.5773%	6.33000%
Kemandirian	65	7.40%	26.75%	17.2930%	4.65538%
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pada tabel 6. diterangkan bahwa banyak sampel (N) sampel yang diperoleh adalah 65 data observasi. Dapat dimengerti bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Provinsi Jawa Barat antara tahun 2019 sampai 2023 memiliki jumlah rata-rata sebesar 17.29%. Nilai minimum 7.40% dan jumlah maksimum adalah 26.75%. Sementara itu, jumlah standar deviasi sebesar 4.65% berada di bawah rata-rata, yang menyatakan bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah memiliki distribusi yang baik.

Dapat diketahui hasil uji statistik variabel rata-rata variabel Retribusi Daerah (X1) pada Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023 adalah 1.04%, presentase terendah 0.19% dan tertinggi 8.13% dan standar deviasi bernilai 1.18% lebih besar dibanding jumlah rata-rata. Dengan rata-rata dibawah nilai standar deviasi, ini menunjukkan jika retribusi daerah masih menghadapi masalah pada pendistribusiannya yang tidak merata.

Dari hasil statistis deskriptif diatas di atas rata-rata variable Dana Perimbangan (X2) pada Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023 adalah 74.27%, presentase terendah 52.74% dan tertinggi 90.50% serta standar deviasi bernilai 6.11% kurang dari nilai rata-rata. Dengan rata-rata Dana Perimbangan yang melebihi nilai deviasi standar, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki distribusi yang baik.

Sementara itu dapat dilihat bahwa rata-rata Belanja Modal (X3) di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah 14.57% dengan nilai terendah 7.57% dan tertinggi 34.15%. Standar deviasi memiliki nilai 6.33% lebih rendah dengan nilai mean. Saat mean melebihi standar deviasi, variabel belanja modal sudah didistribusikan dengan baik.

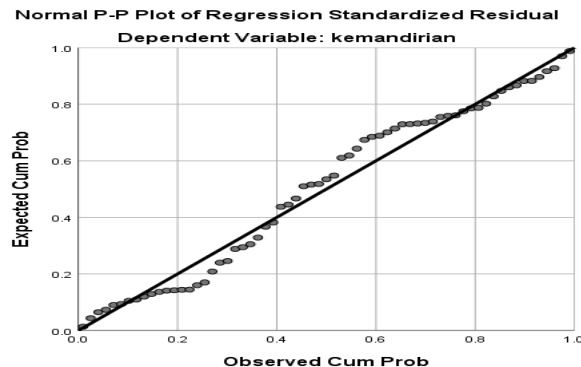
4.2 Pengujian Normalitas

Tabel 7. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	65
Asymp. Sig. (2-tailed)	.055 ^c

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan uji diatas, didapat besaran signifikansi $0,055 > 0,05$, jadi diketahui jika data residual didistribusikan dengan normal dan asumsi normalitas telah dipenuhi.



Melihat grafik di atas, tampak bahwa distribusi titik residual tampak mengikuti pola garis diagonal, yang memperlihatkan bahwa data menyebar secara normal. Sesuai dengan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi sejumlah $0,055 > 0,05$, sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi.

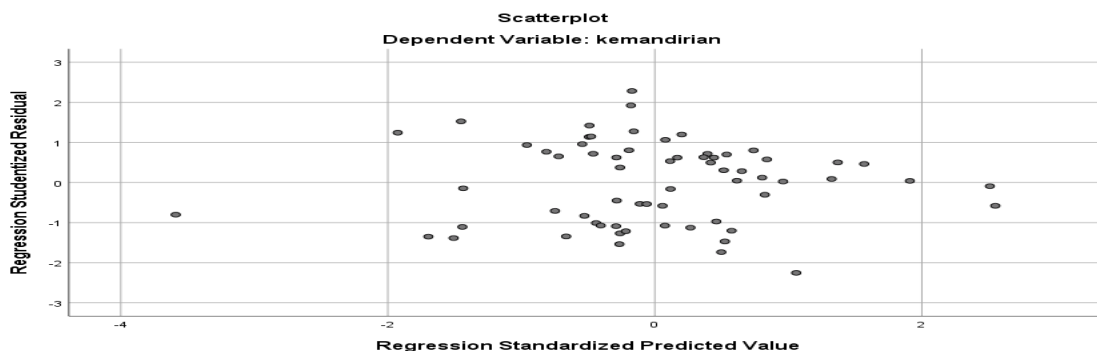
4.3 Pengujian Multikolinearitas

Tabel 8. Pengujian Multikolinearitas

Tolerance	VIF
.906	1.104
.770	1.298
.708	1.413

Semua variabel dapat digunakan karena nilai VIF untuk semuanya $< 10,0$, yang menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak substansial

4.3 Pengujian Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Heteroskedastisitas
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Melihat Gambar 3 di atas, jelas jika sebaran titik residual menyebar dengan acak di daerah garis horizontal nol tanpa terbentuk pola sistematis. Penyebaran residual yang cukup merata tersebut memperlihatkan jika varians residual tetap konstan di semua bagian nilai yang diprediksi. Maka hal tersebut disimpulkan bahwa tidak ada tanda heteroskedastisitas, hal tersebut berarti model regresi yang dipakai mempunyai penyebaran error yang stabil.

4.4 Pengujian Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Tes Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	.512

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Dari uji pada tabel 9. diatas, diperoleh besaran d yaitu 0.512. Jumlah ini akan ditilik dengan nilai dL dan dU di tabel DW, sehingga dengan $\alpha = 0,05$, $k = 3$ dan $n = 512$, telah didapati $dL = 1.5035$ dan $dU = 1.6960$. Sehingga mampu ditarik kesimpulan $0 < d < dL$ jika model tersebut tidak terdapat autokorelasi positif.

4.5 Pengujian Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-3.580	8.325	
	Retribusi Daerah	.016	.484	.004
	Dana Perimbangan	.289	.101	.379
	Belanja Modal	-.040	.102	-.055

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Mengacu pada hasil olah data yang dilakukan, kita bisa menyusun persamaan regresi dapat dibentuk dengan mengacu nilai konstanta serta koefisien regresi yang telah disebutkan:

$$Y = -3,580 + 0,016 X_1 + 0,289 X_2 + -0,40 X_3$$

4.6 Pengujian Korelasi pearson product moment

Tabel 11. Hasil Tes Korelasi pearson product moment

Correlations					
		X1	X2	X3	Y (Kemandirian)
Retribusi Daerah	Pearson Correlation	1	-.109	.304*	-.054
	Sig. (2-tailed)		.388	.014	.670
	N	65	65	65	65
Dana Perimbangan	Pearson Correlation	-.109	1	-.478**	.405**
	Sig. (2-tailed)	.388		.000	.001
	N	65	65	65	65
Belanja Modal	Pearson Correlation	.304*	-.478**	1	-.235
	Sig. (2-tailed)	.014	.000		.060
	N	65	65	65	65
Kemandirian Keuangan	Pearson Correlation	-.054	.405**	-.235	1
	Sig. (2-tailed)	.670	.001	.060	
	N	65	65	65	65

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Dilihat dari olah data, dapat dinyatakan seperti berikut:

Published by:

1. Retribusi Daerah (X1) memiliki tingkat korelasi yang sangat rendah serta tidak menunjukkan signifikansi dalam hubungannya pada Kemandirian Keuangan Daerah (Y), dengan koefisien -0,054 serta nilai signifikansi 0,670, sehingga tidak ada hubungan yang cukup kuat diantaranya keduanya.
2. Dana Perimbangan (X2) memiliki keterhubungan positif yang signifikan pada variabel (Y), dengan nilai korelasi sebesar 0,405 dan tingkat signifikansi 0,001. Artinya, semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh, maka potensi peningkatan kemandirian fiskal daerah juga semakin besar.
3. Belanja Modal (X3) menunjukkan hubungan negatif pada variabel (Y) pada koefisien korelasi sebesar -0,235 dan Tingkat signifikansi 0.060, hubungan tersebut dinyatakan negatif tidak signifikan.

4.7 Pengujian Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.408 ^a	.166	.125	4.35440%	.512

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

$$Kd = (0.408)^2 \times 100\%$$

$$= 16.6464\%$$

Menurut hasil uji, nilai hasil R Square adalah 0,408 yang bisa disimpulkan jika pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kemandirian Keuangan Daerah yaitu 17%, sementara 83% dipengaruhi dari faktor-faktor lainnya.

4.8 Uji T

Tabel 13. Hasil Uji T

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1		
(Constant)	-.430	.669
Retribusi Daerah	.034	.973
Dana Perimbangan	2.846	.006
Belanja Modal	-.394	.695

Sumber: Output Data Diolah Peneliti 2025

Dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ dan tingkat signifikansi α (5%) berdasarkan data pada Tabel 4.13, nilai t-tabel yang dihasilkan adalah 1,670 dengan $df = 61$ (65-3-1).

1. Nilai t hitung sebesar 0,034, yang berada di bawah nilai t tabel (1,670), dan nilai signifikansi (sig) hubungan antara Retribusi Daerah (X1) dan Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,973, yang berada di atas 0,05. Dengan demikian, H2 diterima dan H1 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Y) tidak dipengaruhi oleh Retribusi Daerah (X1).
2. Nilai t hitung sebesar 2,846, di atas nilai t tabel (1,670), sedangkan nilai signifikansi (sig) Dana Perimbangan (X2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,006, di

bawah 0,05. Dengan demikian, H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dipengaruhi oleh Dana Perimbangan (X2).

3. Hasil uji-t selanjutnya adalah $-0,394 < t\text{-tabel} (1,670)$, yang menunjukkan bahwa besarnya (sig) Belanja Modal (X3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) adalah $0,695 > 0,05$. Dengan demikian, H0 diterima dan H3 ditolak. Berdasarkan uji tersebut, Kemandirian Keuangan Daerah (Y) tidak dipengaruhi oleh Belanja Modal (X3).

4.9 Pengujian F

Tabel 14. Hasil Pengujian F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	230.437	3	76.812	4.051	.011 ^b
	Residual	1156.608	61	18.961		
	Total	1387.046	64			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pengujian diatas menunjukkan besaran p (sig) adalah 0,011 serta besaran Fhitung mencapai 4,051. Ftabel bernilai 2,76 dengan $\alpha = 0,05$ derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 61$ ($65 - 3 - 1$). Dengan nilai sig 0,011 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H4 diterima karena Fhitung lebih besar daripada Ftabel ($4,051 > 2,76$). Ini menunjukkan jika secara simultan, variabel Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan pada Kemandirian Keuangan Daerah.

4.10 Pembahasan

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai t sebesar 0,034 yang diperoleh dari uji ini lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar 1.670. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa H0 diterima sementara H1 ditolak. Hasilnya, kemandirian keuangan daerah (Y) dan retribusi daerah (X1) tidak berhubungan. Analisis ini mendukung temuan sebuah studi ([Nainggolan et al., 2023](#)) yang tidak menemukan hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan retribusi daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

H2 diterima karena nilai t hitung, yaitu 2,846 berdasarkan uji hipotesis parsial, lebih tinggi daripada nilai t tabel sebesar 1,670. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dan Dana Perimbangan (X2). Hasil ini konsisten dengan penelitian ([Darise, 2024](#)) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah sampai batas tertentu.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial, H0 diterima dan H3 ditolak karena nilai t-hitung sebesar -0,394 lebih kecil daripada nilai t-tabel sebesar 1,670. Hasil ini menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Y) tidak dipengaruhi oleh Belanja Modal (X3). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menemukan tidak adanya hubungan antara belanja modal dan kemandirian keuangan ([Saraswati & Nurharjanti, 2021](#))

Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berbeda dengan Ftabel, uji hipotesis parsial menghasilkan nilai F hitung yang lebih tinggi ($4,051 > 2,76$). Hal ini menunjukkan bahwa faktor retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersamaan berdampak pada kemandirian keuangan daerah.

5. Kesimpulan

1. Kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berfluktuasi antara tahun 2019 dan 2023. Terdapat 13 wilayah yang memiliki rasio kemandirian instruktif, yang menunjukkan jika hampir 50% wilayahnya belum mandiri. Di Provinsi Jawa Barat, rata-rata tingkat kemandirian keuangan adalah 17,29%; nilai terendah dan tertinggi masing-masing adalah 7,40% dan 26,75%, dengan deviasi standar 4,65% di bawah rata-rata.
2. Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019-2023 adalah 1.04%, presentase terendah 0.19% dan tertinggi 8.13% dan standar deviasi bernilai 1.18% lebih besar dari nilai mean.
3. Dana Perimbangan pada Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023 mempunyai rata-rata 74.27%, dengan nilai minimum 52.74% dan tertinggi 90.50% serta standar deviasi sebesar 6.11% dibawah nilai mean.
4. Belanja Modal pada Provinsi Jawa Bara tahun 2019 hingga 2023 adalah sebesar 14.57% dengan nilai minimum 7.57% dan maksimum 34.15%. Standar deviasi sebesar 6.33% lebih rendah dari nilai mean.
5. Retribusi Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2) tidak berpengaruh signifikan pada hasil uji-t. Sementara itu, Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Perimbangan (X2).
6. Hasil uji F menunjukkan bahwa pada periode 2019–2023, kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat secara simultan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

Daftar Pustaka

- Arrasyidah, H., & Syarif, H. D. (2024). The Effect of Financial Literacy, Internal Control Systems, and Accounting Information Systems on the Quality of MSME Financial Statements in Bandung City. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.1027>
- Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal-Inaba.Hol.Es*, 15(2). <https://jurnal.inaba.ac.id/index.php/JIM/article/view/70/>.
- Darise, I. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(12). <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/8350/6532>
- Djaenuri, A. (2019). *Keuangan Daerah: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah* (Ed.; 1st ed.). CV IRDH.

- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *ECo-Fin*, 7(1), 334–348. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hasibuan, S. N. (2021). Keuangan Daerah: Keluar dari Flypaper Effect. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210721/9/1419922/keuangan-daerah-keluar-dari-flypaper-effect>
- Hidayat, S. (2021). Buku Ajar AKUNTANSI PEMERINTAH PT Inovasi Pratama Internasional (Ed.; 1st ed.). PT Inovasi Pratama Internasional.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Ed.; 4th ed., Vol. 1). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nainggolan, A., Darius Sidauruk, T., & Tito, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.54964/liabilitas/https>
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2, 1–14. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1680>
- Siregar, B. (2017). Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis keuangan pemerintah daerah berbasis aktual (Ed.; 2nd ed., Vol. 1). UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif R & D* (1st ed.). CV. Alfabeta.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Published by:

